



Sets the Standards and Beyond



DDTC Fiscal Research & Advisory

Membangun Bangsa dari Pajak Daerah

2026

International Tax Review (ITR), UK

World Tax 2026



SAMBUTAN DARI FOUNDER DDTC



“Pajak daerah merupakan instrumen strategis dalam pembangunan bangsa.”

Dua dekade telah berlalu semenjak desentralisasi dan otonomi daerah berjalan di Indonesia. Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dari konteks tersebut, salah satu dimensi krusial dalam mencapai tujuan tersebut adalah desentralisasi fiskal, yakni kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya.

Salah satu implikasi dari penerapan desentralisasi fiskal tersebut antara lain pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mencari sumber pendapatan daerah. Dalam hal ini, daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan menyediakan barang publik yang sesuai dengan preferensi masyarakat setempat. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat kewenangan dalam memungut dan mengelola pajak yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui *revenue assignment*.

Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat urgensi bersama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah untuk segera dicapai. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan desain kebijakan dan administrasi pajak daerah (termasuk retribusi) yang efektif dan disertai dengan harmonisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Arah ini tentunya memerlukan perumusan kebijakan dan administrasi pajak yang berbasis pengetahuan dan data (*knowledge and evidence-based*) sehingga menjadi fondasi untuk menciptakan sistem fiskal yang berkelanjutan. Dari konteks tersebut, DDTC Fiscal Research & Advisory hadir untuk memberikan hasil riset dan kajian terbaik dan berkualitas dalam rangka mendukung stakeholder daerah memiliki sistem pajak yang berimbang dan pada gilirannya dapat mewujudkan kemandirian fiskal melalui pajak.

Jakarta, Januari 2026


Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si., LLM Int.Tax
Founder DDTC

SEKILAS TENTANG DDTC FISCAL RESEARCH & ADVISORY

DDTC Fiscal Research & Advisory merupakan pusat kajian, penelitian, dan advis di bidang perpajakan dengan bauran pendekatan akademis dan praktis.

Kami mengemban salah satu misi utama DDTC, yaitu “memengaruhi dan berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan perpajakan untuk memastikan transformasi sistem perpajakan yang seimbang yang melayani kepentingan seluruh *stakeholders*.”



“Perumusan dan implementasi sistem pajak daerah merupakan hal yang menantang karena perlu mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu *technical reasonability*, *political acceptability*, dan *administrative feasibility*.”

PANDANGAN KAMI TERHADAP UU HKPD DAN DAMPAKNYA BAGI PEMDA



B. Bawono Kristiaji, S.E., M.S.E., M.Sc. IBT., BKP., ADIT.

Senior Partner DDTC Fiscal Research & Advisory dengan latar belakang pendidikan Master International Business Tax & Economics dari Tilburg University dan Pemenang CFE Award Albert J. Rädler Medal 2015 untuk tesis perpajakan terbaik se-Eropa, serta memiliki sertifikasi Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) dari CIOT, Inggris. Menghadiri berbagai kursus dan seminar internasional terkait kebijakan pajak yang diselenggarakan oleh Andrew Young School of Policy Studies (Georgia State University) & Harvard Kennedy School (Harvard University) di Amerika Serikat.

“Optimalisasi pajak daerah diperlukan dalam rangka mendorong *state building* dan kontrak fiskal yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pendapatan yang ditopang secara dominan oleh pajak (dan retribusi) daerah akan menginsentif pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.”



Denny Vissaro, S.E., M.S.E., M.A., BKP., ADIT.

Senior Manager DDTC Fiscal Research & Advisory dengan latar belakang pendidikan Master Economics of Development dari Erasmus University Rotterdam dan memiliki sertifikasi ADIT dari CIOT, Inggris serta sertifikasi Konsultan Pajak. Menghadiri berbagai kursus dan seminar internasional terkait kebijakan pajak yang diselenggarakan oleh Maastricht University di Belanda & Tax Policy Center of University of Lausanne di Swiss.

“UU HKPD memberikan landasan untuk memperkuat kinerja optimalisasi pajak dan retribusi daerah guna mencapai kemandirian fiskal dalam koridor NKRI sekaligus membuka ruang keselarasan yang lebih erat antara aspek penerimaan dengan daya saing perekonomian daerah. Namun demikian, sasaran tersebut akan dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam meracik dan melakukan reformasi sistem pajak daerahnya, baik dari sisi kebijakan maupun administrasinya.”

**Hamida Amri Safarina, S.H., BKP., ADIT.**

Assistant Manager DDTC Fiscal Research & Advisory dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada dan memiliki sertifikasi Principle of International Taxation dari CIOT, Inggris, serta sertifikasi Profesi Advokat & Konsultan Pajak. Menghadiri berbagai kursus dan seminar internasional, di antaranya yang diselenggarakan oleh CFE Tax Adviser Europe & Asian Development Bank Institute.

“Simplifikasi pajak melalui UU HKPD dapat memberikan berbagai keuntungan. Adapun keuntungan yang dimaksud adalah menurunkan biaya kepatuhan, menurunkan biaya pemungutan pajak, meningkatkan investasi, dan tentunya meningkatkan kepatuhan. Semakin sederhana suatu sistem pajak, semakin rendah pula biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan.

**Syadesa Anida Herdona, S.I.A., BKP.**

Senior Specialist di DDTC Fiscal Research & Advisory dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal yang bertanggung jawab dalam menganalisis perkembangan dan perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berpengalaman dalam berbagai proyek Pajak Minimum Global (Pilar 2) dengan spesialisasi pada covered taxes untuk berbagai perusahaan multinasional dan terlibat dalam beberapa proyek riset dan konsultasi termasuk PPN di industri petrokimia, implementasi PPN di BUMN, fasilitas pajak untuk industri ekonomi syariah, dan pajak penghasilan untuk tunjangan.

“UU HKPD memberikan jaminan atas salah satu hak yang melekat pada wajib pajak, yaitu adanya upaya penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah melalui gugatan. Dengan kata lain, UU HKPD dapat dikatakan lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan UU sebelumnya.”

**Rinaldi Adam Firdaus, S.E., BKP.**

Senior Specialist di DDTC Fiscal Research & Advisory dengan latar belakang pendidikan Sarjana Akuntansi dari Universitas Darma Persada yang memiliki pengalaman di bidang akuntansi, kepatuhan pajak dan litigasi. Terlibat dalam proyek penelitian dan konsultasi beberapa industri seperti e-commerce dan kontraktor pertambangan, serta aktif menulis artikel perpajakan di DDTCNews.

“Terdapat tiga tantangan utama sistem pajak daerah. Pertama, ketergantungan dari pos pajak daerah tertentu sehingga rentan secara jangka panjang. Kedua, mayoritas pemerintah daerah berfokus pada aspek kebijakan dan kurang menitikberatkan pada terobosan administrasi dan pelayanan. Ketiga, proyeksi penerimaan yang tidak berbasis potensi sehingga mengurangi urgensi optimalisasi *tax effort*.”

DUKUNGAN KAMI

DDTC Fiscal Research & Advisory menawarkan dukungan dalam bentuk analisis pajak dan penelitian fiskal yang objektif, jelas, dan berkualitas bagi seluruh stakeholder pajak daerah.

Tax Revenue Projection

Proyeksi penerimaan pajak dan retribusi daerah memerlukan pengukuran yang kredibel serta mencerminkan kapasitas dan potensi penerimaan. Kami hadir untuk membantu perumusan target pendapatan pajak daerah yang berbasis pendekatan empiris serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Tax Gap Analysis

Kajian ini bertujuan untuk memberikan analisis dan perhitungan mengenai perbedaan antara potensi pendapatan berdasarkan basis pajak dengan pendapatan pajak aktual yang diterima oleh daerah. Selanjutnya, *tax gap analysis* juga memproyeksi realisasi penerimaan masing-masing jenis pajak daerah dan memberikan pemetaan mengenai tantangan dan kendala dalam optimalisasinya.

Benchmarking Analysis

Analisis kami bertujuan untuk mengukur kapasitas fiskal, desain peraturan, dan kinerja pajak daerah melalui studi komparasi dan *benchmarking*. *Benchmarking analysis* memiliki keluaran berupa pemeringkatan dan/atau indeks sebagai salah satu referensi untuk penyempurnaan tata kelola pajak daerah. Analisis ini juga bisa dipergunakan sebagai alat untuk memetakan daya saing fiskal antara satu daerah dengan lainnya.

Tax Diagnostic Analysis

Makalah akademik kami memberikan analisis komprehensif mengenai masalah kebijakan dan administrasi di bidang perpajakan dengan melakukan penilaian (*assessment*), analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Dengan kedalaman analisis dan menggunakan pendekatan multi-perspektif (kebijakan, administrasi, dan hukum), kajian ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* pajak di daerah.

Reformasi Administrasi Pajak Daerah & Legal Drafting

Dalam mendorong ketersediaan dana pembangunan daerah yang berkelanjutan, kami siap membantu menyusun peta jalan reformasi kebijakan dan terobosan administrasi yang dibutuhkan. Tentunya, dukungan ini juga disesuaikan dengan konteks prioritas dan tantangan yang dihadapi setiap daerah. Kami juga siap mendukung proses penyusunan rancangan hukum berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah yang selaras dengan koridor peraturan perundang-undangan.

Capacity Building

Kami menyadari bahwa efektivitas kebijakan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah akan sangat bergantung dari sistem administrasi di tiap pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami siap menjadi mitra dalam membangun kapasitas dan kelembagaan administrasi pemungutan pajak daerah, termasuk dalam hal pelatihan, pendekatan berbasis teknologi, desain prosedur penegakan hukum, dan sebagainya.

Kajian Isu Pajak Daerah lainnya

Kami juga memiliki kompetensi dalam melakukan kajian bagi berbagai isu pajak daerah lainnya seperti **desain insentif pajak daerah**, **kepatuhan pajak daerah**, dan **sengketa pajak daerah**.

PRODUK UNGGULAN

TAX GAP ANALYSIS & REVENUE FORECASTING

- Ditujukan sebagai referensi perumusan KUA/PPAS dan Perda APBD
- Menggunakan pendekatan multidisipliner
- Mengidentifikasi penyebab adanya *tax gap*
- Melakukan proyeksi penerimaan per jenis pajak berdasarkan potensi basis pajak
- *Fiscal projection & revenue foregone method*
- Memberikan rekomendasi target penerimaan pajak sesuai dengan analisis & perhitungan kuantitatif

TAX LAW DESIGN & LEGAL DRAFTING

- Penyusunan Perda sesuai dengan UU HKPD dan koridor pembentukan peraturan perundang-undangan
- Penyusunan naskah akademis yang komprehensif dan mendalam
- Desain sistem pajak daerah yang sesuai dengan konsep/teori, *benchmarking*, potensi dan keunikan daerah, dalam koridor desentralisasi fiskal di Indonesia
- Analisis atas kerangka insentif pajak daerah
- Membangun peta jalan pembenahan administrasi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kepatuhan, kemudahan, keadilan, serta kepastian hukum

APA YANG MENJADI KELEBIHAN KAMI?



DDTC Fiscal Research & Advisory memiliki kompetensi, pengetahuan yang mendalam, pengalaman, dan kredibilitas yang berbeda dari lembaga penelitian perpajakan lain di Indonesia.

Keseimbangan antara Akademis dan Praktis

Standar kami yang tinggi memungkinkan kami untuk memberikan hasil yang ideal, yang mana mempertimbangkan *technical reasonability*, *political acceptability*, dan *administrative feasibility*

Keahlian Multidisiplin

Tim kami berasal dari berbagai latar belakang keilmuan yang relevan dengan konteks perumusan dan implementasi pajak dan retribusi daerah. Kami percaya bahwa sistem perpajakan harus mencakup aspek keuangan negara, politik, kebijakan publik, hukum, teknologi, administrasi fiskal, dan akuntansi.

Terbukti Berpengalaman

Selama bertahun-tahun, kami telah membuktikan kontribusi yang tak terbantahkan bagi perkembangan lanskap perpajakan Indonesia.

Independen

Berdiri teguh pada integritas, kami mendasarkan penelitian kami pada perspektif akademis untuk menemukan keseimbangan kesejahteraan yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan perpajakan.

Data dan Literatur yang Komprehensif

Kami memiliki perpustakaan perpajakan yang lengkap, akses literatur pada berbagai sumber yang dapat dipercaya, serta database peraturan daerah, sebagai sumber utama kami untuk melakukan penelitian berdasarkan teori dan fakta.

Jejaring yang Luas

Kami memiliki jejaring yang luas dengan *stakeholders* perpajakan yang berpengaruh dan *prominent*, baik pada tataran subnasional, nasional, dan internasional.

PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI



Mendapatkan nominasi Tax Policy Firm of the Year, Pro Bono Firm of the Year, Diversity Equity & Inclusion Firm of the Year, dan Tax Technology Firm of the Year untuk level se-Asia Pasifik dari International Tax Review (ITR), sebuah lembaga pemeringkat firma pajak yang berbasis di Inggris pada 2025.



Atas konsistensi melakukan kegiatan pengarusutamaan dan literasi publik tentang isu perpajakan, DDTC meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak, Perkumpulan Prakarsa, dan Hukum Online.

Kami terlibat secara aktif dalam perumusan sistem perpajakan yang ideal dan berimbang bagi seluruh pemangku kepentingan.

JEJARING KAMI

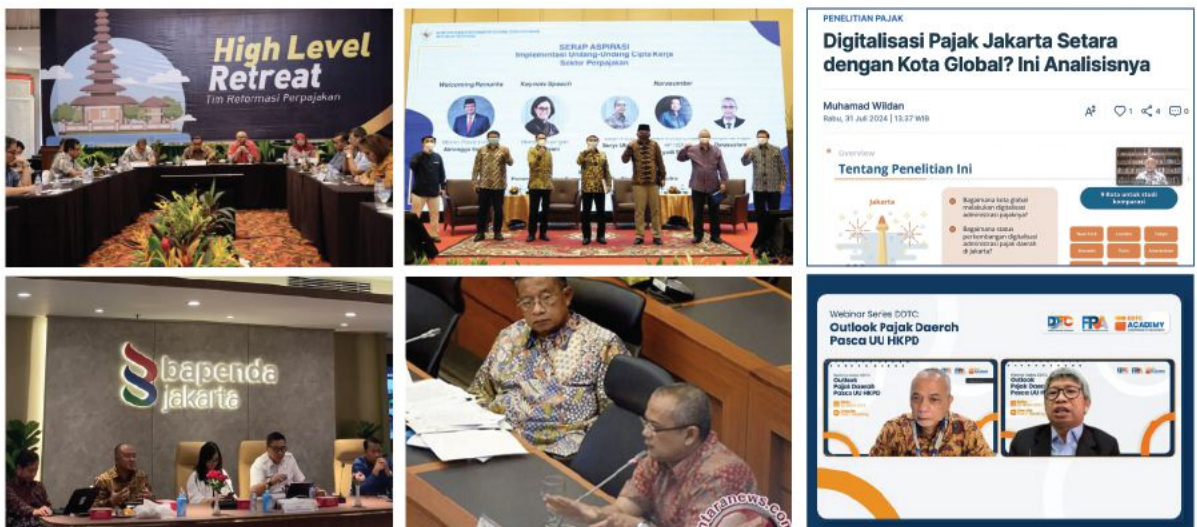
Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi di Daerah

Kami memiliki komitmen yang kuat dalam misi pendidikan dengan bekerja sama dengan universitas ternama. Saat ini, kami telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan lebih dari 40 universitas terkemuka di Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru daerah. Jaringan tersebut memungkinkan kami untuk berkolaborasi dengan banyak akademisi dalam melakukan *assessment* secara tepat atas kondisi fiskal, khususnya pajak di masing-masing daerah.



Keterlibatan pada Program Pemerintah

Sesuai dengan salah satu misi kami yaitu memengaruhi dan berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan perpajakan, DDTCA Fiscal Research & Advisory turut berperan aktif dalam berbagai diskusi dan formulasi kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.



CAPACITY BUILDING

Kami percaya bahwa *capacity building* sumber daya manusia di area pajak dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan literasi serta transfer pengetahuan yang sistematis dan terpercaya.



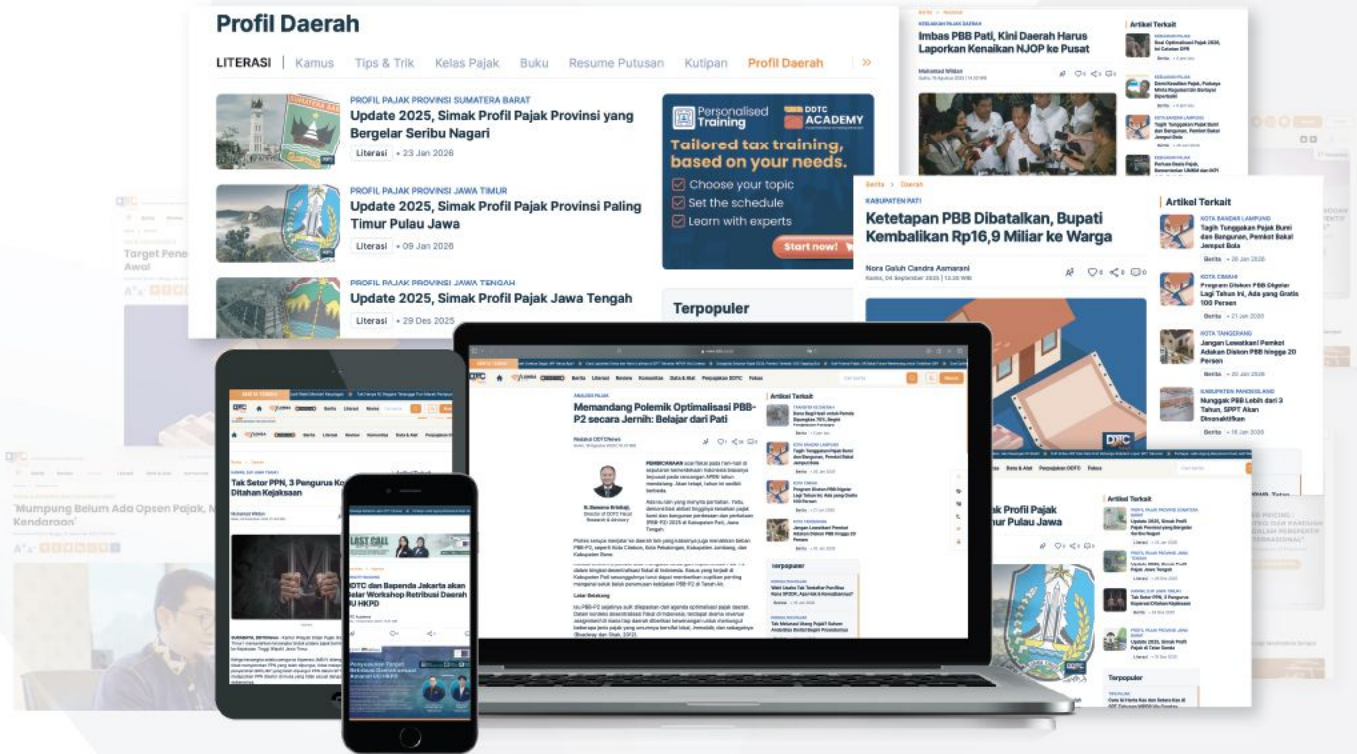
Perpustakaan kami adalah salah satu sumber literatur perpajakan terlengkap di Indonesia

Perpustakaan terbuka untuk umum untuk belajar dan berdiskusi bersama



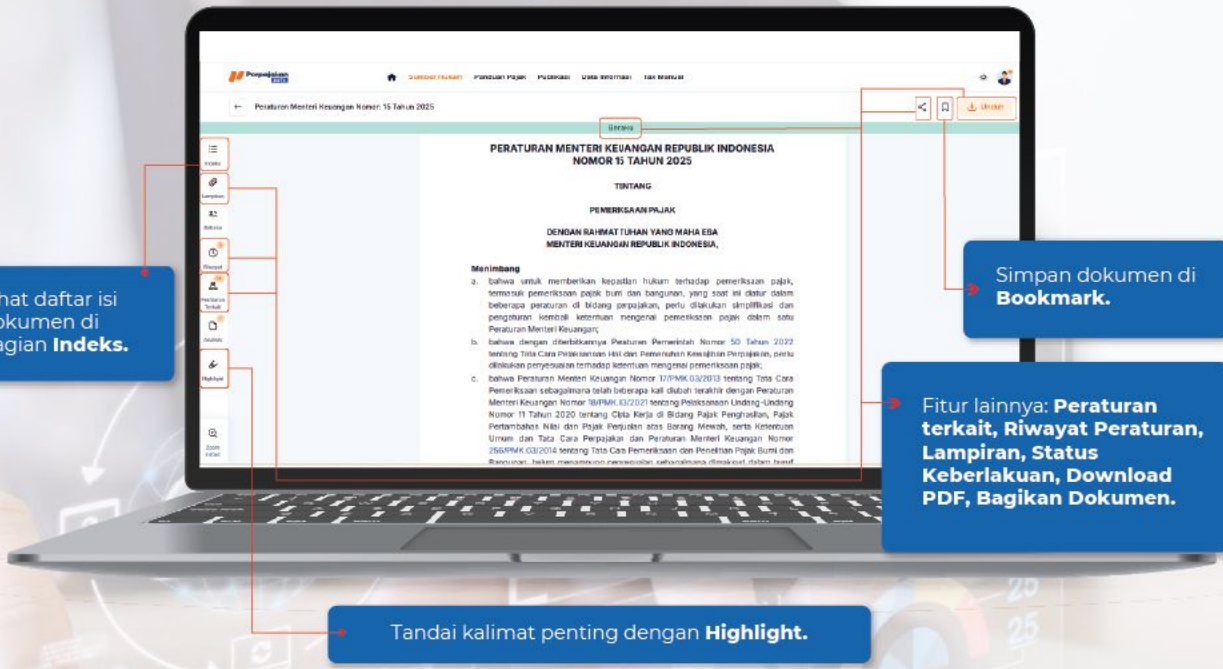
Fasilitas pelatihan kami dikembangkan demi menciptakan atmosfer transfer pengetahuan yang nyaman dan modern.





news.ddtc.co.id

Portal media perpajakan kami, DDTCTNews, menjadi rujukan masyarakat perpajakan Indonesia dan dikunjungi rata-rata lebih dari 1 juta pembaca/bulan. DDTCTNews turut mencermati perkembangan serta pemikiran di area pajak daerah.



perpajakan.ddtc.co.id

Melalui perpajakan ddtc, kami menyediakan platform pusat dokumentasi dan database di area perpajakan, termasuk perda tentang pajak dan retribusi daerah di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan dokumentasi peraturan yang lengkap akan memudahkan analisis benchmarking, khususnya dalam hal penyusunan perda bagi tiap daerah.

KAMI SIAP MEMBERIKAN ASISTENSI BAGI PEMERINTAH DAERAH

Hubungi Kami melalui:



+62 811-1887-812



fra@ddtc.co.id



Menara DDTC

Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No. B
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240 - Indonesia
Phone: +6221 2938 2700, Fax: +6221 2938 2699

DDTC Surabaya

Pakuwon Center 23rd Floor
Jl. Embong Malang No.1, Kedungdoro
Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60261
Hotline DDTC: +62 8111-287-881

ddtc.co.id



Sets the Standards and Beyond



DDTC Fiscal Research & Advisory



ddtc.co.id